

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA DAN KELEMBAGAAN, DESA, KEBIJAKAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ((Studi kasus Pada Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)

Karmeta putri, M. Titan Terzaghi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Bina Darma Palembang

Karmetaputri1107@gmail.com, itan00771@gmail.com

Abstract

Abstract: The purpose of this study is to examine the effect of Financial Management of Village Fund Allocation, Village Policy, and Village Institutions, on Community Welfare. This is also to find out whether the allocation of the village or village kebjian village funds and village institutions together affect the welfare of the community. The respondents consisted of 98 people of different ages, occupations and education are different All data processed by multiple regression analysis by looking at the validity test, reliability, by testing the hypothesis with the f test and t test. The results of this study indicate that the effect of accountability of village fund allocation in village institutional policies on community welfare has a joint effect on community welfare

Keywords: Village Fund Allocation, Village Policy, Village Institutions, and Community Welfare

Tujuan Penelitian ini menguji pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan desa, Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini juga untuk mengetahui apakah Alokasi dana desa kebjian desa dan kelembagaan desa Secara bersama sama berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat. Responden terdiri dari 98 orang dari berbagai umur ,pekerjaan dan pendidikan yang berbeda beda Semua data di olah dengan analisis regresi berganda dengan melihat uji validitas, reabilitas,dengan pengujian hipotesis dengan uji f dan uji t. hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa kebijakan desa kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat berpengaruh secara bersama terhadap kesejahteraan masyarakat

Kata kunci : Alokasi Dana Desa,Kebijakan Desa,Kelembagaan Desa, Dan Kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan strategi yang ada di Indonesia adalah untuk meningkatkan dan pemeratakan pembangunan dan hasinya melewati tujuan kebijakan pembangunan sektoral serta kinerja masyarakat terutama yang ada di desa. Pembangunan desa adalah suatu subjek pembangunan dan juga sebagai gerakan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang diikuti oleh kesadaran dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk yang ada di Indonesia bertempat tinggal diperdesaan. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah menyebutkan bahwa otonom yang diberikan daerah seluruhnya untuk mengurus semua kegiatan pemerintah tidak termasuk kewenangan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan daerah yang bersangkutan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dan juga otonomi yang nyata serta bertanggung jawab. Nyata berarti bahwa dalam melaksanakan urusannya menurut kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah, sedangkan bertanggung jawab merupakan dalam penyelenggaraan otonomi harus samadengan maksud dan tujuan pemberian otonomi dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya termasuk di lingkungan pedesaan. Kesejahteraan masyarakat desa dalam paradigma pembangunan ekonomi dan perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan ekonomi akan mengakibatkan kesejangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Desa Banuayu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim yang dikenal memiliki berbagai potensi di dalamnya. Hal ini dikarenakan meskipun secara geografis Desa Banuayu merupakan desa terkecil di wilayah Kecamatan Rambang Dangku dengan luas wilayah sebesar 3.734 Ha, namun memiliki tingkat pembangunan dan perekonomian yang tumbuh cukup cepat jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di kecamatan yang sama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan baik dalam skala besar maupun menengah yang ada di Desa Banuayu. Hal ini tentunya akan berdampak baik bagi perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Banuayu juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proporsional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD)

KAJIAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) merupakan hal yang fundamental dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini disebabkan besarnya jumlah ADD yang didapatkan pemerintah desa dari pemerintah kabupaten dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan utama yang dapat digunakan dalam mendanai program-program

kegiatan pemerintah desa guna tercapainya kemakmuran masyarakat desa. Dengan adanya akuntabilitas pengelolaan ADD dapat dipastikan bahwa mekanisme dari pengadaaan ADD sampai pertanggungjawaban penggunaanya juga terjamin sehingga hal ini tentu berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rusydi (2012), Dura (2016) dan Syafi'i (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Kurniawati (2017) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hadil penelitian tidak konsisten, sehingga peneliti perlu melakukan penelitian kembali mengenai kesejahteraan masyarakat ke dalam hipotesis berikut:

H1: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan desa dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa setempat yang diharapkan dengan diterapkannya peraturan tersebut dapat membuat tujuan bagi kepentingan desa tercapai. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa biasanya selalu dipertimbangkan dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Dura (2016) dan Syafi'i (2018), menunjukkan hasil variabel kebijakan desa memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan penelitian Kurniawati (2017) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara kebijakan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hadil penelitian tidak konsisten, sehingga peneliti perlu melakukan penelitian kembali mengenai kesejahteraan masyarakat ke dalam hipotesis berikut:

H2: Kebijakan Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengaruh Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kelembagaan desa di dalam penelitian ini diraikan sebagai perangkat desa yang berperan di dalam pemerintahan desa. Kelembagaan di desa di buat dengan tugas dan perannya masing-masing yang diharapkan dapat bersama-sama mencapai tujuan desa yang salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan desa.

Hal ini sesuai dengan penelitian Dura (2016), yang menyatakan bahwa kelembagaan desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) dan Syafi'i (2018) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa penelitian

terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian tidak konsisten, sehingga peneliti perlu melakukan penelitian kembali mengenai kesejahteraan masyarakat ke dalam hipotesis berikut:

H3: Kelembagaan Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang akan dibuktikan secara objektif. Penelitian ini dilakukan di Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah warga desa yang berdomisili di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Banuayu merupakan Desa yang terletak di kecamatan rambang dangku kabupaten muara enim dengan luas wilayah 352.003 hektar yang terdiri atas 6 dusun, 6 RW, dan 17 RT. Batas wilayah administrasi Desa Banuayu sebelah barat desa Bulang Belimbing, sebelah utara desa Dalam, sebelah selatan desa , dan sebelah timur desa Kuripan. Sedangkan Jarak dari Desa Banuayu ke Ibu Kota Kecamatan \pm 4 km, ke Ibu Kota Kabupaten \pm 6 km, dan ke Ibu Kota Provinsi \pm 90 km. Dan dapat ditempuh dengan roda empat dan roda dua, dengan kondisi jalan dengan perkerasan batu pasir.

Secara geografis, Desa Banuayu adalah merupakan wilayah pergunungan/dataran dengan ketinggian 0,3 km diatas permukaan yang terdiri dari persawahan dan perkebunan serta pemukiman dengan di suplay oleh 2 mata air yaitu mata air ci bonteng, mata air Cikalomberan serta di dukung pula oleh mudahnya air bawah tanah yang cukup mudah untuk didapat. Desa banuayu penduduknya tidak terlalu banyak dan rata-rata penghasilan Banuayu sebagian besar berpenghasilan sebagai petani dan karyawan di Pt Tell.

Uji Validitas

Tabel 4.1 Correlations

		TOTAL_X1	TOTAL_X2
TOTAL_X1	Pearson Correlation	1	,356**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	98	98
TOTAL_X2	Pearson Correlation	1	,356**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	98	98
TOTAL_X3	Pearson Correlation	1	,549**
	Sig. (2-tailed)	.2201	,000
	N	98	98
TOTAL_Y	Pearson Correlation	1	,746**

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: data diolah tahun 2019

Uji validitas

Tabel 4.4 Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha	N of Items
X1	,839	12
X2	,729	9
X3	,906	9
Y	,924	9

Sumber: data

diolah tahun 2019

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai *reliability statistics* dari variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa didapat nilai *cronbach's alpha* sebesar $0,839 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa konsisten. Nilai *reliability statistics* dari variabel kebijakan desa didapat nilai *cronbach's alpha* sebesar $0,729 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai variabel kebijakan desa konsisten. Nilai *reliability statistics* dari variabel kelembagaan desa didapat nilai *cronbach's alpha* sebesar $0,906 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai variabel kelembagaan desa konsisten. Nilai *reliability statistics* dari variabel kesejahteraan masyarakat didapat nilai *cronbach's alpha* sebesar $0,906 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai variabel kesejahteraan masyarakat konsisten

Analisis Regresi

Tabel 4.3

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,550	,254		6,108	,000
X1	,055	,120	,048	,456	,650
X2	-,296	,180	-,216	-1,643	,104
X3	,238	,131	,232	1,819	,072

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah tahun 2019

4.4 Pembahasan

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa memiliki nilai signifikansi = 0,650 > *level of significant* (α)= 0,05 karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

Variabel Kebijakan Desa (X2) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, variabel kebijakan desa memiliki nilai signifikansi = 0,104 > *level of significant* (α)= 0,5 karena nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kebijakan desa (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Variabel Kelembagaan Desa (X3) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, variabel likuiditas memiliki nilai signifikansi = 0,072 > *level of significant* (α)= 0,1 karena nilai signifikan lebih besar dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel likuiditas (X3) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Positif

Hasil uji T pada regresi berganda di penelitian ini menunjukkan bahwa nilai beta sebesar 0,048 dan nilai signifikan sebesar 0,650. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak berpengaruh secara signifikan, dapat ditarik

kesimpulan bahwa hasil penelitian variabel ini menolak hipotesis. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil Rusydi (2012), Dura (2016), Syafi'i dkk (2018) dan Tahir (2018) yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Kurniawati (2017), Simarmata (2016) yang memperoleh hasil yang sama yaitu tidak terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan dana yang diberikan belum dapat dimanfaatkan sebaik - baiknya dalam pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman, keterampilan dan kemampuan dari pemerintah setempat.

Kebijakan Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil uji T pada regresi berganda di penelitian ini menunjukkan bahwa nilai beta sebesar 0,048 dan nilai signifikan sebesar 0,650. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kebijakan desa tidak berpengaruh secara signifikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian variabel ini menolak hipotesis. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil Rusydi (2012), Dura (2016), Syafi'i dkk (2018) dan Tahir (2018) yang menyatakan bahwa variabel kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Kurniawati (2017), dan Simarmata (2016) yang memperoleh hasil yang sama yaitu tidak terdapat pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan desa yang saya teliti disini masih belum optimal karena tugas dan fungsi dari kebijakan desa belum berjalan dengan baik. Keterbatasan sosialisasi serta kebijakan desa dalam setiap aktifitas yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Kelembagaan Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil uji T pada regresi berganda di penelitian ini menunjukkan bahwa nilai beta sebesar 0,232 dan nilai signifikan sebesar 0,072. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian variabel ini menerima hipotesis. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil Kurniawati (2017), dan Simarmata (2016) yang menyatakan bahwa variabel kelembagaan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengaruh Akuntabilitas Pengalokasian Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim yang penulis sajikan pada bab sebelumnya (bab IV), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

Hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengalokasian keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat ditolak, yang berarti akuntabilitas pengalokasian keuangan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis yang menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat ditolak, hal ini dapat dijelaskan bahwa Hal ini dikarenakan kebijakan desa yang saya teliti disini masih belum optimal karena tugas dan fungsi dari kebijakan desa belum berjalan dengan baik.

Hipotesis yang menyatakan bahwa kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat diterima, yang berarti dimana kelembagaan di desa bisa menerima masukan dari masyarakat sehingga kelembagaan desa dapat memberikan kebijakan yang untuk mensejahterakan masyarakatnya.

REFERENSI

- [1] Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- [2] Bappenas. (2002). Program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan.
- [3] Bintarto. (1989). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- [4] Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubuglakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka*. 10 (1): 26-32
- [5] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- [7] Kurniawati, Y. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung dan Kelembagaan Kampung terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*. 12 (2).
- [8] Nasikun. (1993). *Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana: Yogyakarta. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. *Desa*.
Permendagri No. 133 Tahun 2014. *Desa*.
- [9] Rusydi. (2012). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Unismuh*.
- [10] Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Sekaran, U. (2009). *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku I. Jakarta: Salemba Empat

- [12] Simarmata, A.C. (2016). *Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Huta Durian*. Skripsi. Universitas Medan Area: Medan.
- [13] Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [14] Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. PT. Gramedia: Jakarta.
- [15] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- [16] Supomo, B dan Indriantoro, N. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: BFEE UGM.
- [17] Syachbani, W. (2012). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- [18] Syafi'i, R.I., Mahsuni, A.W., dan Afifudin, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. 7 (2).
- [19] Tahir, E. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi). Skripsi. Universitas Halu Oleo: Kendari.
- [20] Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif*. 1 (1): 51-64.
- [21] Todaro, P. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Indonesia*. Erlangga: Jakarta.
- [22] Todaro, P dan Smith, C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga: Jakarta. Undang-Undang Dasar No. 11 Tahun 2009
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah* Undang-Undang No. 72 Tahun 2005. *Desa*. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Desa*.